



## Peran Poitik Islam Dalam Dinamika Pmemerintahan : Perspekt dalam Negeri dan Luar Negeri

Muhammad Husen Haikal<sup>1</sup>,

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung<sup>1</sup>

haikalhusen13@gmail.com<sup>1</sup>

Article Info	ABSTRACT
<p><b>Article history:</b></p> <p>Received 5 Mei 2024</p> <p>Revised 6 November 2024</p> <p>Accepted 11 November 2024</p>	<p><i>This study discusses the role of Islamic politics in government dynamics, with a focus on domestic and foreign perspectives. Islamic politics is a key factor influencing political policies and processes in many countries with a majority Muslim population. The aim of this research is to analyze how political Islam plays an important role in shaping government systems and public policies, both domestically and at the international level. This research uses a qualitative approach by combining literature analysis and case studies from several countries that represent differences within the country and abroad. The analysis was carried out by considering aspects such as Islamic political participation, the influence of Islamic politics on policy changes, and the impact of Islamic politics in international relations. The research results show that Islamic politics has a significant role in the dynamics of government in the country. Islamic political participation, through Islamic-based political parties or social movements, can influence the policy-making process and change the political orientation of the country. Factors such as religious identity, social justice, and the aspirations of Muslims often form the basis of Islamic politics in taking positions in government. At the international level, political Islam also plays an important role. Countries with a majority Muslim population often use Islamic politics as a tool to maintain their sovereignty and fight for their interests in the international arena. This can be seen in relations between Muslim countries and Western countries and in issues such as Palestine and the role of Islam in global affairs.</i></p> <p><b>Keyword:</b> <i>Islamic Politics, Government Dynamic, Political Participant, Public Policy, Internasional Diplomatic</i></p>

### **Kata Kunci:**

Politik Islam,  
Dinamika  
Pemerintahan,  
Partisipasi Politik,  
Kebijakan Publik,  
Hukum Internasional .

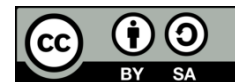
### **Abstrak**

Studi ini membahas peran politik Islam dalam dinamika pemerintahan, dengan fokus pada perspektif dalam negeri dan luar negeri. Politik Islam menjadi faktor kunci yang memengaruhi kebijakan dan proses politik di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana politik Islam memainkan peran penting dalam membentuk sistem pemerintahan dan kebijakan publik, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan analisis



literatur dan studi kasus dari beberapa negara yang mewakili perbedaan dalam negeri dan luar negeri. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti partisipasi politik Islam, pengaruh politik Islam terhadap perubahan kebijakan, dan dampak politik Islam dalam hubungan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik Islam memiliki peran yang signifikan dalam dinamika pemerintahan di dalam negeri. Partisipasi politik Islam, melalui partai politik berbasis Islam atau gerakan sosial, dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan mengubah orientasi politik negara. Faktor-faktor seperti identitas agama, keadilan sosial, dan aspirasi umat Islam sering menjadi dasar politik Islam dalam mengambil posisi dalam pemerintahan. Di tingkat internasional, politik Islam juga memainkan peran penting. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim sering menggunakan politik Islam sebagai alat untuk menjaga kedaulatan dan memperjuangkan kepentingan mereka di arena internasional. Hal ini dapat terlihat dalam hubungan antara negara-negara Muslim dengan negara-negara Barat dan dalam isu-isu seperti Palestina dan peran Islam dalam urusan global.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license*



## **Pendahuluan**

Politik Islam telah menjadi fenomena yang menarik perhatian dunia dalam beberapa dekade terakhir. Dalam banyak negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, politik Islam memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sistem pemerintahan dan kebijakan publik. Fenomena ini menunjukkan pentingnya memahami peran politik Islam dalam dinamika pemerintahan dari perspektif dalam negeri dan luar negeri.<sup>1</sup>

Dalam konteks dalam negeri, politik Islam sering kali menjadi kekuatan yang menggerakkan perubahan politik dan sosial di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Pada konteks Domestik, politik Islam telah menjadi kekuatan yang signifikan dalam mengubah lanskap politik dan sosial di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam studi

---

<sup>1</sup> Andrianti, N. (2015). Peran media massa nasional dalam politik internasional. *Informasi*, 45(1), 43-56.



yang dilakukan Zaprul Khan, politik Islam berkembang dengan cukup pesat, merupakan usaha dari para komunitas Muslim untuk menyesuaikan prinsi-prinsip Islam dengan masyarakat dan politik di Indonesia. Dengan demikian, politik Islam dapat beradaptasi keberagaman pada perubahan social-politik secara terbuka, bebas dan konkret.<sup>2</sup>

Partisipasi politik Islam dalam sistem pemerintahan dalam negeri dapat bervariasi, mulai dari partai politik yang didasarkan pada ideologi Islam yang kuat, hingga kelompok gerakan sosial yang memperjuangkan perubahan sosial dan politik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Partai politik berbasis Islam, gerakan sosial, dan pemimpin agama Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk kebijakan publik dan membentuk sistem pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai agama dan keadilan sosial.<sup>3</sup> Partai-partai politik Islam sering kali berhasil memperoleh dukungan yang signifikan dari masyarakat Muslim yang ingin melihat implementasi kebijakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Dalam beberapa kasus, partai politik Islam bahkan berhasil memperoleh kekuasaan dan membentuk pemerintahan berdasarkan agenda-agenda politik dan sosial mereka.

Partisipasi politik Islam pada sistem pemerintahan dalam negeri dapat berdampak ke berbagai aspek kebijakan, mulai dari bidang ekonomi dan pendidikan hingga hukum dan hubungan internasional. Misalnya, dalam bidang ekonomi, partai politik Islam sering kali mendorong implementasi kebijakan ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam, seperti sistem keuangan syariah dan redistribusi kekayaan yang lebih adil. Di bidang pendidikan, politik Islam dapat mempengaruhi kebijakan kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan pendidikan

---

<sup>2</sup> Zaprul Khan Zaprul Khan, "Dinamika Pemikiran Politik Islam Di Indonesia," *JRP (Jurnal Review Politik)* 3, no. 2 (2013): 153–67, <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1004>.

<sup>3</sup> Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63-83.



agama yang lebih terintegrasi.<sup>4</sup> Namun, peran politik Islam tidak terbatas pada tingkat dalam negeri. Di tingkat internasional, politik Islam juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara negara-negara Muslim dan negara-negara lain. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim sering menggunakan politik Islam sebagai alat untuk menjaga kedaulatan dan memperjuangkan kepentingan mereka di arena internasional. Hal ini terlihat dalam isu-isu seperti Palestina, di mana politik Islam berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak rakyat Palestina. Selain itu, politik Islam juga berkontribusi dalam membentuk peran dan pandangan dunia Islam dalam urusan global. Negara-negara Muslim sering kali mengambil posisi yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama mereka dalam isu-isu seperti hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan perang melawan terorisme. Politik Islam di tingkat internasional juga dapat memengaruhi hubungan antara negara-negara Muslim dengan negara-negara Barat, menciptakan dinamika yang kompleks dalam diplomasi dan kerja sama internasional.

Peran politik Islam dalam dinamika pemerintahan menjadi sangat penting dalam pemebuatkan kebijakan public dan system pemerintahan baik dalam negeri maupun internasional. Kebaruan dalam penelitian ini terdapat pada analisa secara komprehensif terhadap bagaimana politik Islam memainkan peran dalam membentuk kebijakan dan proses politik di tingkat lokal dan global. Peran politik Islam dalam negeri juga dapat tercermin dalam berbagai aspek kebijakan publik. Dalam bidang ekonomi, politik Islam sering kali mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti keuangan syariah, distribusi kekayaan yang lebih adil, dan bantuan sosial untuk kelompok yang membutuhkan. Begitu juga dengan politik islam secara internasioal, memiliki pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara negara-negara Muslim dengan negara-negara lain. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim

---

<sup>4</sup> Ulya, Z. (2016). Dinamika penerapan hukum jinayat sebagai wujud rekonstruksi syari'at islam di aceh. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 135-148.



sering kali menggunakan politik Islam sebagai alat untuk menjaga kedaulatan dan memperjuangkan kepentingan mereka di arena internasional.

Politik Islam juga berkontribusi dalam membentuk peran dan pandangan dunia Islam dalam urusan global. Negara-negara Muslim sering kali mengambil posisi yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama mereka dalam isu-isu global seperti hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan perang melawan terorisme. Ini menciptakan dinamika kompleks dalam diplomasi dan kerja sama internasional antara negara-negara Muslim dan negara-negara Barat.<sup>5</sup>

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana politik Islam memengaruhi sistem pemerintahan dan kebijakan publik di dalam negeri, serta dampaknya dalam hubungan internasional.<sup>6</sup> Maka, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana politik Islam memengaruhi kebijakan publik, adaptasi sosial-politik, hubungan diplomatik, dan pandangan dunia negara-negara Muslim dalam konteks domestik dan internasional. Diharapkan ada relevansi penting dalam konteks perubahan politik dan sosial yang terjadi di dunia. Pemahaman yang lebih baik tentang peran politik Islam dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dari dinamika politik dan pemerintahan yang dipengaruhi oleh faktor agama.

## **Metode Penelitian**

Studi pustaka tentang peran politik Islam dalam dinamika pemerintahan melibatkan analisis mendalam terhadap sejarah, teori, dan praktik politik Islam baik dalam konteks domestik maupun internasional. Dalam skala domestik, peran politik Islam sering kali menjadi

---

<sup>5</sup> Rosyada, D. (2017). Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah. Kencana.

<sup>6</sup> Zakiyah, K. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). AL-FALAH: Journal of Islamic Economics, 2(1), 37-52.



elemen kunci dalam pembentukan dan evolusi sistem pemerintahan di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Pemahaman ini memperluas wawasan tentang bagaimana agama, identitas, dan politik berinteraksi dalam membentuk tata kelola negara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengeksplorasi peran politik Islam dalam dinamika pemerintahan domestik dan internasional. Studi ini dirancang sebagai analisis pustaka yang memusatkan perhatian pada literatur akademik dan dokumen resmi terkait peran politik Islam dalam pemerintahan negara-negara mayoritas Muslim. Pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup literatur relevan seperti buku, artikel jurnal, laporan kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan politik Islam, kebijakan publik, serta hubungan internasional. Data yang terkumpul akan dianalisis melalui analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang terkait dengan peran politik Islam, termasuk partisipasi politik, pembentukan kebijakan publik, tantangan hubungan agama-negara, dan dampaknya pada diplomasi internasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan peran politik Islam di beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Turki, Indonesia, dan negara-negara di Timur Tengah. Pendekatan komparatif ini bertujuan untuk memahami bagaimana konteks politik, sosial, dan budaya yang berbeda mempengaruhi peran politik Islam dalam setiap negara.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini akan menyusun kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara politik Islam dan proses kebijakan publik, serta dampaknya pada hubungan internasional di negara-negara mayoritas Muslim. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur dan dokumen yang dipilih berdasarkan kredibilitas dan relevansinya dalam studi politik Islam. Setelah analisis selesai, penelitian ini akan merumuskan kesimpulan tentang



peran politik Islam dalam pembentukan kebijakan publik dan hubungan internasional, diharapkan mampu memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan peneliti lainnya dalam memahami dinamika politik Islam dalam konteks pemerintahan domestik dan global.

Penelitian ini mengakui adanya keterbatasan, seperti akses terbatas terhadap data primer dari negara-negara tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan yang dapat melibatkan studi empiris guna memperkaya pemahaman tentang peran politik Islam di berbagai negara mayoritas Muslim. Metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan analisis mendalam dan komprehensif yang relevan dalam memahami pengaruh politik Islam terhadap tata kelola pemerintahan dan hubungan internasional.

## **Pembahasan**

### **Peran Politik Islam dalam Dinamika Pemerintahan di Dalam Negeri**

Politik Islam di negara mayoritas muslim memiliki dinamika cukup kompleks antara agama, kekuasaan, dan ideologi. Gerakan politik Islam mulai terpengaruhi semenjak jatuhnya kepemimpinan Turki Utsmani sehingga kehampaan politik di kalangan muslim mulai bermunculan. Hal tersebut mendorong munculnya organisasi keislaman di Mesir yang mengimplementasikan Syariah Islam<sup>7</sup>. Pada masa selanjutnya gerakan politik Islam semakin meluas diberbagai negara-negara Islam dan mendapatkan Dukungan dari masyarakat dalam menghadapi sekularisasi oleh pemerintah, dengan gerakan politik Islam tersebut membawa kepada perubahan politik pada suatu negara.

---

<sup>7</sup> Jhon Afrizal, "GERAKAN SOSIAL POLITIK ISLAM DUNIA ( Asas Perubahan Skenario Politik Negara ) Oleh : Jhon Afrizal Dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," *Jurnal Sosial Budaya* 9, no. 1 (2012): 137–58.



Pengaruh sejarah, menjadi salah satu aspek yang dapat mempengaruhi dinamika politik islam dinegara-negara mayoritas Muslim. Tidak hanya aspek sejarah saja yang menjadi kunci dalam interaksi antara politik islam dan system pemerintahan. Pemahaman Syariah dari berbagai negara dengan sebgaiian kebijakanya menerapkan hukum islam sebagai dasar agama memberikan peran penting dalam mengarahkan kebijakan dan memberikan legitimasi kepada partai politik islam. Partai politik di negara yang mayoritas muslim cukup berperan penting dalam proses demokratisasi dan pembentukan kebijakan public . sebagai contoh pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Indonesia, merupakan partai yang bisa beradaptasi dengan demokrasi modern. Kontribusi yang dilakukan ialah menjaga nilai-nilai demokratis seperti musyawarah dan menentang otoritarianisme, dengan prinsip partai mencakup kejujuran, persatuan dan musyawarah<sup>8</sup>.

Politik Islam memainkan peran yang signifikan dalam dinamika pemerintahan di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Peran politik Islam ini dapat dilihat dalam berbagai aspek, termasuk partisipasi politik, pembentukan sistem pemerintahan, dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Berikut ini adalah poin-poin penting yang membahas peran politik Islam dalam dinamika pemerintahan di dalam negeri:

1. Partisipasi Politik Islam: Partai politik berbasis Islam dan gerakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam memainkan peran penting dalam mempengaruhi perubahan politik di dalam negeri. Mereka mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat Muslim yang ingin melihat implementasi kebijakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Melalui partisipasi politik, politik Islam dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan mengambil peran dalam pemerintahan.

---

<sup>8</sup> Khoiro Ummatin, "Demokratisasi Dalam Politik Kepartaian Islam," *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2020): 19–30, <https://doi.org/10.53491/porosnim.v1i1.23>.





2. Pembentukan Sistem Pemerintahan: Politik Islam juga berperan dalam membentuk sistem pemerintahan di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam beberapa kasus, partai politik Islam berhasil memperoleh kekuasaan dan membentuk pemerintahan yang mencerminkan agenda politik dan sosial mereka. Hal ini dapat mengarah pada implementasi kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti hukum Islam atau implementasi keadilan sosial.
3. Pengaruh Terhadap Kebijakan Publik: Politik Islam juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan publik di dalam negeri. Misalnya, dalam bidang ekonomi, politik Islam sering mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti keuangan syariah, redistribusi kekayaan yang lebih adil, dan pemberdayaan ekonomi umat Muslim. Di bidang pendidikan, politik Islam mempengaruhi kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai agama dan memastikan pendidikan agama yang terintegrasi dalam sistem pendidikan.

### **Peran Politik Islam dalam Dinamika Pemerintahan di Luar Negeri**

Pemerintahan di negara mayoritas muslim memanfaatkan nilai dan identitas islam sebagai kekuatan politik dalam mempertahankan kedaulatan serta memperkuat pada diplomasi internasional. Islam yang dijadikan dasar legitimasi dalam negeri telah membangun royalitas rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang menerapkan nilai nilai agama yang universal seperti keadilan dan kedamaian. Melalui Organisasi Kerja sama Islam (OKI) negara mayoritas muslim cukup menjaga isu-isu keumatan dan hak asasi yang meneguhkan kedautan negara dengan negara lain. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat kesatuan dan persatuan nasional dan



memperkuat diplomatic yang memperjuangkan kepentingan kolektif dunia dalam keamanan, perdamaian dan ekonomi<sup>9</sup>.

Politik Islam juga memiliki peran yang signifikan dalam dinamika pemerintahan di tingkat internasional. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim menggunakan politik Islam untuk menjaga kedaulatan dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam hubungan dengan negara-negara lain. Berikut adalah poin-poin penting yang membahas peran politik Islam dalam dinamika pemerintahan di luar negeri:

1. Peran dalam Hubungan Internasional: Politik Islam memengaruhi hubungan antara negara-negara Muslim dengan negara-negara Barat dan non-Muslim. Negara-negara Muslim sering mengambil posisi yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama mereka dalam isu-isu global seperti hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan perang melawan terorisme. Politik Islam juga berkontribusi dalam membentuk pandangan dunia Islam dalam urusan internasional.
2. Perjuangan Palestina: Isu Palestina menjadi salah satu contoh signifikan peran politik Islam dalam dinamika pemerintahan di luar negeri. Politik Islam memainkan peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menggalang dukungan internasional untuk perjuangan rakyat Palestina. Negara-negara Muslim menggunakan politik Islam sebagai alat untuk mempertahankan hak-hak Palestina dan mencapai solusi yang adil untuk konflik tersebut.
3. Diplomasi dan Kerja Sama Internasional: Politik Islam juga menciptakan dinamika dalam diplomasi dan kerja sama internasional. Kedaulatan agama dan identitas Islam menjadi faktor yang memengaruhi hubungan antara negara-negara Muslim dan negara-

---

<sup>9</sup> Yuseptia Angretnowati and Meike Lusye Karolus, "Negara, Gerakan Islam Pasca-Fundamentalis Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia: Kekuasaan Simbolik Dan Upaya Konsolidasi," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 13, no. 2 (2022): 369–93, <https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.369-393>.



negara Barat dalam berbagai isu seperti perdagangan, investasi, keamanan, dan penyebaran nilai-nilai politik.

Pentingnya memahami peran politik Islam dalam dinamika pemerintahan dalam negeri dan luar negeri terletak pada upaya untuk memahami dinamika politik dan sosial di negara-negara Muslim serta hubungan antara negara-negara Muslim dengan negara-negara lainnya. Melalui pemahaman yang komprehensif, akan lebih mungkin untuk mengembangkan strategi kebijakan yang tepat dalam menghadapi perubahan politik dan sosial di era globalisasi saat ini.

Bagaimana politik Islam memengaruhi politik regional di dunia Muslim menunjukkan betapa pentingnya gerakan Islam di luar negeri untuk membentuk kebijakan internasional. Negara-negara mayoritas Muslim sering mendukung kelompok Muslim di kawasan konflik melalui narasi solidaritas Islam yang kuat. Tetapi dampak ini dapat menyebabkan ketegangan antarnegara ketika solidaritas agama bertentangan dengan kepentingan geopolitik negara. Gerakan transnasional mendorong kebijakan agama di luar negeri juga menyebabkan komunikasi politik yang lebih baik di dalam negeri. Ini memperkuat legitimasi politik Islam di dalam negeri sekaligus memperkuat posisi mereka dalam solidaritas regional<sup>10</sup>.

### **Tantangan dan Kontroversi dalam Peran Politik Islam dalam Dinamika Pemerintahan**

Meskipun peran politik Islam dalam dinamika pemerintahan dapat membawa perubahan positif, terdapat pula tantangan dan kontroversi yang perlu diperhatikan. Beberapa poin penting yang perlu dibahas adalah sebagai berikut:

1. Pluralisme dan Toleransi: Dalam beberapa kasus, politik Islam menghadapi tantangan dalam mengakomodasi keberagaman dalam masyarakat. Dalam negara-negara dengan

---

<sup>10</sup> Muhamad Latip Kahpi, Ali Syahbana Siregar, and Romadhon Sahrhu, "Dinamika Komunikasi Politik Islam: Narasi Dan Dampak Dalam Konteks Politik Kontemporer," *Hikmah* 18, no. 1 (2024): 1–130, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aiqidah-ta/article/view/5653>.



masyarakat multikultural, terdapat kebutuhan untuk menjaga prinsip pluralisme dan toleransi terhadap minoritas agama dan kelompok etnis. Politik Islam harus mampu memastikan perlindungan hak-hak minoritas dan membangun kerja sama dengan kelompok-kelompok non-Muslim dalam membangun masyarakat yang inklusif.

2. **Konflik dan Radikalisasi:** Tantangan lain yang dihadapi oleh politik Islam adalah konflik dan radikalisasi. Beberapa gerakan politik Islam atau kelompok-kelompok terkait dapat berpotensi mengadopsi pandangan radikal atau ekstremis yang melanggar hak asasi manusia dan mengancam stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi politik Islam untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan penolakan terhadap kekerasan.
3. **Hubungan dengan Negara-Negara Non-Muslim:** Politik Islam juga menghadapi tantangan dalam menjalin hubungan dengan negara-negara non-Muslim. Perbedaan nilai dan pandangan antara negara-negara Islam dan negara-negara non-Muslim dapat menimbulkan gesekan dan ketegangan dalam diplomasi dan kerja sama internasional. Dalam menghadapi tantangan ini, politik Islam perlu mampu menjalin dialog, mempromosikan kerjasama, dan mencari kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

### **Implikasi dan Relevansi Peran Politik Islam dalam Dinamika Pemerintahan**

Pemahaman yang mendalam tentang peran politik Islam dalam dinamika pemerintahan memiliki implikasi dan relevansi yang penting dalam beberapa aspek:

1. **Pembentukan Kebijakan Publik:** Memahami peran politik Islam membantu para pengambil kebijakan dalam merancang kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Muslim. Hal ini termasuk kebijakan ekonomi yang adil, pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai agama, dan perlindungan hak-hak minoritas dalam kerangka prinsip-prinsip demokrasi.



2. Kerjasama Internasional: Pemahaman tentang peran politik Islam juga penting dalam mempromosikan kerjasama internasional antara negara-negara Muslim dan non-Muslim. Dengan mempertimbangkan pandangan dan nilai-nilai politik Islam, negara-negara dapat mencari titik kesamaan dan membangun hubungan yang saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, keamanan, dan isu-isu global.
3. Menangani Tantangan Ekstremisme: Politik Islam yang moderat dan inklusif dapat berperan dalam melawan radikalisme dan ekstremisme yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan dan keamanan nasional. Pemahaman yang lebih baik tentang peran politik Islam dalam mendorong toleransi, dialog antaragama, dan penolakan terhadap kekerasan akan membantu upaya pencegahan dan deradikalisasi.

Politik Islam memiliki peran yang signifikan dalam dinamika pemerintahan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam negeri, politik Islam mempengaruhi partisipasi politik, pembentukan sistem pemerintahan, dan kebijakan publik di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Di tingkat internasional, politik Islam memengaruhi hubungan antara negara-negara Muslim dan negara-negara lain serta memainkan peran dalam isu-isu global seperti perjuangan Palestina dan diplomasi internasional. Memahami peran politik Islam dalam dinamika pemerintahan adalah kunci untuk memahami dinamika politik dan sosial di negara-negara Muslim dan hubungan internasional yang melibatkan negara-negara tersebut.<sup>11</sup>

Peran politik Islam dalam dinamika pemerintahan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, memiliki implikasi yang signifikan dalam mempengaruhi sistem pemerintahan, kebijakan publik, dan hubungan internasional. Sementara politik Islam dapat membawa perubahan positif, juga dihadapkan pada tantangan dalam mengakomodasi keberagaman, mengatasi radikalisme, dan menjalin hubungan dengan negara-negara non-Muslim.

---

<sup>11</sup> Syamsuadi, A. (2018). Membangun Demokrasi Pemerintahan di Riau Dalam Perspektif Budaya Melayu. JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 1(1), 1-10.



Pemahaman yang komprehensif tentang peran politik Islam adalah penting untuk merancang kebijakan yang responsif, mempromosikan kerjasama internasional, dan menangani tantangan ekstremisme.

## **Penutup**

Peran politik Islam dalam dinamika pemerintahan, baik di tingkat domestik maupun internasional, memiliki dampak signifikan terhadap sistem pemerintahan, kebijakan publik, dan hubungan antarnegara. Pemahaman yang komprehensif mengenai politik Islam sangat penting untuk merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim dan membangun kerjasama internasional yang saling menguntungkan. Dengan mempromosikan politik Islam yang moderat dan inklusif, kita dapat melawan radikalisme serta ekstremisme yang mengancam stabilitas dan keamanan. Selain itu, analisis yang mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan politik spesifik di setiap negara akan mencegah generalisasi yang berlebihan.

Kolaborasi dan dialog antara negara-negara Muslim dan non-Muslim menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang ada. Dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti cendekiawan, politisi, dan masyarakat sipil kita dapat menciptakan kerangka kerja yang inklusif untuk mencapai tujuan bersama seperti perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan. Menggali pengetahuan tentang sejarah dan praktik politik Islam di berbagai konteks akan membantu menciptakan strategi kebijakan yang lebih efektif, serta mendukung pengembangan yang berkelanjutan dalam peran politik Islam dalam dinamika pemerintahan

## **Daftar Pustaka**

Afrizal, Jhon. "GERAKAN SOSIAL POLITIK ISLAM DUNIA ( Asas Perubahan Skenario Politik Negara ) Oleh : Jhon Afrizal Dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau." *Jurnal Sosial Budaya* 9, no. 1 (2012): 137–58.



Angretnowati, Yuseptia, and Meike Lusye Karolus. "Negara, Gerakan Islam Pasca-Fundamentalis Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia: Kekuasaan Simbolik Dan Upaya Konsolidasi." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 13, no. 2 (2022): 369–93.

<https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.369-393>.

Latip Kahpi, Muhamad, Ali Syahbana Siregar, and Romadhon Sahr. "Dinamika Komunikasi Politik Islam: Narasi Dan Dampak Dalam Konteks Politik Kontemporer." *Hikmah* 18, no. 1 (2024): 1–130. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/5653>.

Ummatin, Khoiro. "Demokratisasi Dalam Politik Kepartaian Islam." *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2020): 19–30. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v1i1.23>.

Zaprul Khan, Zaprul Khan. "Dinamika Pemikiran Politik Islam Di Indonesia." *JRP (Jurnal Review Politik)* 3, no. 2 (2013): 153–67.

<http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1004>.

Ulya, Z. (2016). Dinamika penerapan hukum jinayat sebagai wujud rekonstruksi syari'at islam di aceh. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 135-148.

Pulungan, J. S. (2018). Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an. *Intizar*, 24(1), 185-202.

Rosyada, D. (2017). *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*. Kencana.

Syamsuadi, A. (2018). Membangun Demokrasi Pemerintahan di Riau Dalam Perspektif Budaya Melayu. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 1(1), 1-10.

Andrianti, N. (2015). Peran media massa nasional dalam politik internasional. *Informasi*, 45(1), 43-56.

Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63-83.

Zakiah, K. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 37-52.